

**DIREKTORAT JENDERAL SUMBERDAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**



**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
IRIGASI (RP2I)**

2019

KATA PENGANTAR

Petunjuk Teknis Penyusunan RP2I ini disiapkan dalam rangka memberikan arahan bagi pihak BBWS/BWS atau pihak lain yang memerlukannya terkait perencanaan terpadu dan partisipatif untuk pengelolaan irigasi di tingkat daerah irigasi (DI) dalam hal pembuatan Dokumen RP2I dalam program IPDMIP

Dalam Petunjuk Teknis ini disampaikan gambaran umum penyusunan RP2I, Kerangka Isi RP2I, jadwal penyusunan RP2I, penentuan skala prioritas penanganan DI, serta tata cara pengisian formulir RP2I. Diharapkan melalui Petunjuk Teknis ini dokumen RP2I di tingkat BBWS/BWS atau pihak yang memerlukannya dapat disusun dan diketahui oleh Kepala BBWS/BWS atau pimpinan masing-masing lembaga/institusi lainnya agar dokumen RP2I yang telah disusun dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sejak ditetapkan.

Demikian Petunjuk Teknis penyusunan RP2I ini disiapkan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas segala masukan dan koreksinya demi penyempurnaan Petunjuk Teknis ini di kemudian hari, sebelumnya disampaikan terima kasih.

Tim Penyusun
Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I. GAMBARAN UMUM	1
BAB II. KERANGKA DOKUMEN RP2I	3

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Outline Dokumen RP21
- Tabel 2 : Penjelasan Dokumen Pengesahan RP21
- Tabel 3 : Penjelasan Bab Pendahuluan Dokumen RP21
- Tabel 4 : Penjelasan Strategi dan Kebijakan di dalam Dokumen RP21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Contoh Lembaran Pengesahan

DAFTAR LAMPIRAN

- FORM-01 : RPJMN/D Bidang Pertanian
- FORM-02 : Informasi Umum RP21
- FORM-03 : Rekap Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP21)
- FORM-04 : Rekap Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP21)-Bidang PUPR
- FORM-05 : Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP21) LIST Daerah Irigasi (DI)
- FORM-06 : Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP21) Jadwal Pelaksanaan RP21 Per Daerah Irigasi (DI)
- FORM-07 : Rekapitulasi Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP21)-Bidang PUPR

Pengembangan Jaringan Irigasi Baru dan Peningkatan

- FORM PU-01 : Sosialisasi & Konsultasi Publik
- FORM PU-02 : Survei, Investigasi dan Disain (SID)
- FORM PU-03 : Pengadaan Tanah
- FORM PU-04 : Pelaksanaan Konstruksi
- FORM PU-05 : Persiapan Operasi & Pemeliharaan
- FORM PU-06 : Modernisasi Irigasi

Rencana Pengelolaan Irigasi

- FORM PU-07 : Operasi Jaringan Irigasi
- FORM PU-08 : Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- FORM PU-09 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi

BAP-01 : BAPPEDA

PER-01 : BIDANG PERTANIAN

Contoh Format Dokumen RP2I

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bangda	: Pembangunan Daerah
BBWS/BWS	: Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai
DI	: Daerah Irigasi
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
KOMIR	: Komisi Irigasi
O & P	: Operasi dan Pemeliharaan
PJPA	: Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air
PJSA	: Pemanfaatan Jaringan Sumber Air
Poktan/Gapoktan	: Kelompok tani/Gabungan Kelompok tani
PPSI	: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
PSDA - WS	: Pengelolaan Sumber Daya Air – Wilayah Sungai
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
P3A/GP3A/IP3A	: Perkumpulan Petani Pemakai Air/Gabungan P3A/Induk P3A
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RP2SI	: Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
RTRW/RDTR	: Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang
Setda	: Sekretariat Daerah
e-PAKSI	: elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi

BAB I. GAMBARAN UMUM

1.1. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyiapan Petunjuk Teknis Penyusunan RP2I ini adalah Sebagai Acuan Pemerintah atau dalam hal ini pihak BBWS/BWS dan pihak lain yang memerlukannya agar dapat menyusun RP2I dalam bentuk Dokumen RP2I yang siap untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sejak ditetapkan.

Sedangkan tujuan disiapkannya Juknis Penyusunan RP2I adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kerangka isi RP2I;
2. Menjelaskan cara finalisasi Dokumen dan legalisasi RP2I; dan
3. Menjelaskan format pengesahan Dokumen RP2I.

1.2. Sasaran

Sasaran atau target dari Juknis Penyusunan RP2I ini adalah:

1. Pihak BBWS/BWS; dan
2. Pihak lain yang memerlukan Dokumen RP2I dalam pengelolaan irigasi di tingkat DI pada setiap wilayah kewenangannya masing-masing.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Juknis Penyusunan RP2I adalah sebagai berikut:

1. Gambaran umum yang memuat maksud, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup disusunnya Juknis Penyusunan RP2I oleh BBWS/BWS atau pihak lain yang memerlukan Dokumen RP2I;
2. Kerangka isi RP2I yang memuat outline dan penjelasan tentang isi dari Dokumen RP2I;
3. Finalisasi dan legalisasi RP2I yang memuat kegiatan penyelesaian pembuatan RP2I dan proses legalisasi Dokumen RP2I; dan

4. Format pengesahan Dokumen RP2I yang memuat form pengesahan Dokumen RP2I agar dalam implementasinya dapat digunakan oleh pihak BBWS/BWS atau pihak lain dalam penyiapan RP2I.

BAB II. KERANGKA DOKUMEN RP2I

2.1. Kerangka Dokumen RP2I

Adapun dokumen RP2I merupakan produk dari hasil penyusunan RP2I yang terdiri dari 2 (dua) hal utama yakni:

1. Dokumen pengesahan RP2I; dan
2. Dokumen RP2I.

Dokumen pengesahan RP2I adalah dokumen yang memuat aspek legalitas dokumen RP2I, dimana Kepala BBWS/BWS atau pihak lain yang membutuhkan dokumen RP2I sebagai acuan rencana strategis pelaksanaan irigasi di wilayah kewenangan masing-masing menanda tangani dokumen dimaksud. Sedangkan isi dokumen RP2I adalah dokumen yang memuat rencana pengembangan dan pengelolaan seluruh daerah irigasi (DI) dan urutan prioritas penanganannya per tahun sesuai kewenangannya masing-masing.

Adapun outline dokumen RP2I secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Outline Dokumen RP2I

No.	Daftar Materi Dokumen RP2I
I	Dokumen Pengesahan
1	Halaman Judul
2	Lembaran Pengesahan
3	Kata Pengantar
4	Daftar Isi
II	Daftar Isi Dokumen RP2I
1	Pendahuluan

No.	Daftar Materi Dokumen RP2I
1.1	Latar Belakang
1.2	Maksud dan Tujuan
1.3	Ruang Lingkup
2	Gambaran Umum Pertanian dan Irigasi
2.1	Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Pertanian dan Irigasi
2.2	Kondisi Geografis
a	Geografi
b	Topografi
c	Cuaca dan Musim
d	Keadaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
e	Ketersediaan Air untuk Irigasi
f	Penggunaan Tanah dan Kesesuaian Tanah untuk Irigasi
2.3	Kondisi Demografi
a	Jumlah, Kepadatan, dan Pendidikan Penduduk
b	Mata Pencaharian dan Tingkat Kemiskinan
c	Peran Serta Wanita dalam Kegiatan Irigasi
2.4	Kondisi Sistem Irigasi
a	Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KP)
b	Kondisi Aset Irigasi
c	Kondisi Kinerja Sistem Irigasi

No.	Daftar Materi Dokumen RP2I
2.5	Pendapatan Petani
a	Penguasaan dan Kepemilikan Lahan Irigasi
b	Pola Tanam dalam 5 Tahun Terakhir
c	Produksi dan Produktivitas Tanaman dalam 5 Tahun Terakhir
d	Pengelohan dan Pemasaran Hasil Pertanian
e	Pendapatan dan Pola Pendapatan Petani Sawah Irigasi
3	Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
3.1	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.1.1	Rencana Pengembangan Irigasi
a	Pembangunan Jaringan Irigasi Baru
b	Peningkatan Jaringan Irigasi
3.1.2	Rencana Pengelolaan Irigasi
a	Operasi Jaringan Irigasi
b	Pemeliharaan Jaringan Irigasi
c	Rehabilitasi Jaringan Irigasi
d	Persiapan Operasi dan Pemeliharaan
e	Penyusunan Tata Tanam Global
f	Penyusunan Tata Tanam Detail
3.2	Bidang BAPPEDA
3.2.1	Pemberdayaan KPI

No.	Daftar Materi Dokumen RP2I
a	Penyiapan Kerangka Hukum untuk PPSI
b	Penguatan KPI
c	Penyusunan Rencana PPSI (RP2I)
d	KOMIR
e	Evaluasi Kinerja PPSI
3.2.2	Pemberdayaan TPM
a	Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)
b	Pelatihan KTPM dan TPM
3.2.3	Pelatihan dan Penyusunan PSETK
a	Pelatihan PSETK
b	Pelaksanaan PSETK
3.3	Bidang Pertanian
3.3.1	Pemberdayaan KPI
a	Pengembangan Pertanian
b	Pemberdayaan Poktan dan Gapoktan
3.3.3	Peningkatan Pendapatan Usaha Tani
a	Fasilitasi Akses Informasi dan Kredit Pertanian
b	Bantuan Teknis Sistem Stimulan (Benih, Pupuk, dan lain-lain)
3.3.4	Jaminan Keberlanjutan Pertanian
a	Peningkatan Daya Guna Lahan dan Air

No.	Daftar Materi Dokumen RP2I
b	Menyusun Mekanisme Insentif/Disinsentif Alih Fungsi Lahan
c	Penegakan Hukum untuk Mencegah Alih Fungsi Lahan
d	Melaksanakan Usaha Tani Hemat Air
e	Melaksanakan Gerakan Hemat Air
4	Penjadwalan Penanganan DI sesuai Skala Prioritas
4.1	Data DI Sesuai Kewenangan
4.2	Jadwal Pelaksanaan DI Berbasis Skala Prioritas
5	Penutup
5.1	Kesimpulan
5.2	Saran
6	Lampiran
6.1	Form Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
6.2	Format Pengesahan/Legalisasi Dokumen RP2I

Catatan:

No (nomor) dalam tabel 1 adalah nomor yang memberikan urutan daftar materi isi RP2I dan bukan urutan nomor daftar isi dalam dokumen RP2I.

2.2. Penjelasan Kerangka Dokumen RP2I

Tabel-tabel berikut ini menjelaskan beberapa pasal yang dianggap penting dari Dokumen RP2I yang harus disiapkan oleh Tim Penyusun Dokumen RP2I.

2.2.1. Dokumen Pengesahan RP2I

Tabel 2. Penjelasan Dokumen Pengesahan RP2I

I	Dokumen Pengesahan
----------	---------------------------

1	Halaman Judul
2	Lembaran Pengesahan
3	Kata Pengantar
4	Daftar Isi

Adapun penjelasan tabel 2 adalah sebagai berikut:

1. Halaman Judul: “DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI (RP2I) BBWS/BWS.....TAHUN 2019”
2. Lembaran Pengesahan adalah lembaran yang menjelaskan legalitas dokumen RP2I yang ditanda tangani oleh Kepala BBWS/BWS atau pihak lain yang membutuhkan Dokumen RP2I seperti tertera dalam gambar 1.

LEMBARAN PENGESAHAN

**DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
(RP2I)**

BBWS/BWS.....

2019

DISETUJUI OLEH:

KEPALA BBWS/BWS.....

(.....)

NIP:.....

Gambar 1. Contoh Lembaran Pengesahan

3. Kata Pengantar merupakan bagian dari dokumen RP2I yang mengandung beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Penjelasan singkat tentang isi dokumen RP2I;
 - b. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyiapan dokumen RP2I;
 - c. Mengungkapkan keterbatasan/kekurangan dokumen RP2I dan perlunya kritik dan saran bagi penyempurnaan dokumen RP2I; dan
 - d. Harapan terselenggaranya pelaksanaan RP2I guna mendukung tercapainya ketahanan pangan sebagaimana tertera dalam RPJMN/RPJMD.
4. Daftar Isi adalah bagian dari dokumen RP2I yang menjabarkan isi dokumen halaman per halaman atau tiap bab.

2.2.2. Dokumen RP2I

Tabel 3. Penjelasan Bab Pendahuluan Dokumen RP2I

II	Dokumen RP21
1	Pendahuluan
1.1	Latar Belakang
1.2	Maksud dan Tujuan
1.3	Ruang Lingkup

Adapun penjelasan tabel 3 adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang dokumen RP2I adalah bagian mendasar yang memberikan penjelasan kepada semua pihak khususnya BBWS/BWS atau pihak lain yang memerlukan dokumen RP2I terkait pelaksanaan RP2I di wilayah kewenangan masing-masing. Dalam latar belakang dokumen RP2I setidaknya terdapat beberapa hal sebagai berikut: i) harapan adanya peningkatan ketahanan pangan, ii) dasar pemikiran atau alasan disusunnya dokumen RP2I bagi peningkatan ketahanan pangan, dan iii) solusi yang disarankan secara singkat terkait peningkatan ketahanan pangan.

2. Maksud dan Tujuan dokumen RP2I adalah:
 - a. Maksud dokumen RP2I adalah merupakan bagian yang menjelaskan dampak dari pencapaian tujuan dokumen RP2I, dan
 - b. Tujuan dokumen RP2I adalah merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil atau sesuatu yang akan diperoleh setelah adanya pelaksanaan RP2I terkait ketahanan pangan.
3. Ruang Lingkup dokumen RP2I adalah bagian yang menunjukkan hal-hal secara singkat terkait semua hal yang tertera dalam dokumen RP2I.

Tabel 4. Penjelasan Strategi dan Kebijakan di dalam Dokumen RP21

II	Dokumen RP21
2	Gambaran Umum Pertanian dan Irigasi
2.1	Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Pertanian dan Irigasi
2.2	Kondisi Geografis
2.3	Kondisi Demografi
2.4	Kondisi Sistem Irigasi
2.5	Pendapatan Petani

Adapun penjelasan tabel 4 adalah sebagai berikut:

1. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Pertanian dan Irigasi adalah bagian dari dokumen RP2I yang menjelaskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Detail Pelaksanaan (Rencana Strategis) yang diambil dari RPJMN atau RPJMD bagi pihak lain yang membutuhkan dokumen RP2I di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Form **RPJMN-D**.
2. Penjelasan pasal-pasal selanjutnya dapat mengacu kepada penjelasan didalam contoh Format Dokumen RP2I pada Lampiran yaitu: Contoh Format Dokumen RP2I.

3. Kondisi geografis: menjelaskan tentang geografi, topografi, keadaan muka bumi dari aspek letak, cuaca, iklim, relief, jenis tanah, flora dan fauna serta sumber daya alamnya. Letak suatu wilayah berhubungan dengan lokasi, posisi batas wilayah kabupaten, bentuk dan luas. Dilengkapi juga dengan Gambar Peta Administrasi Kabupaten. Selain itu menceritakan juga kondisi DAS sungai, Ketersediaan air permukaan pada sungai-sungai utama dan penjelasan tentang trend ketersediaan air pada 5 tahun terakhir, berkaitan dengan keadaan DAS). (Informasi tentang wilayah potensi air tanah, dari Bappeda/Dinas PU, disajikan dalam bentuk Tabel atau peta, bila sudah tersedia). Penggunaan tanah dan Kesesuaian tanah untuk irigasi memberikan gambaran tentang jenis tanaman yang sesuai untuk dikembangkan
4. Kondisi Demografi: menjelaskan Jumlah penduduk, kepadatan dan pendidikan penduduk kabupaten ditampilkan dalam bentuk tabel-tabel (data bisa didapat dari BPS atau kabupaten dalam angka)
5. Kondisi Sistem Irigasi seperti
 - a. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KP) menceritakan tentang Menggambarkan kinerja dari pengelola irigasi, tugas dan Organisasi Dinas yang Membidangi Irigasi, Status Sumber Daya Manusia di Pemerintahan Kabupaten, informasi kerja Komisi Irigasi menjelaskan tentang Struktur organisasi Komisi Irigasi, Informasi & Kinerja P3A/GP3A Informasi tentang jumlah P3A/GP3A/IP3A yang sudah ada, status hukumnya, serta partisipasi GP3A dalam kegiatan O&P jaringan irigasi utama disajikan dalam FORMAT tabel.
 - b. Kondisi Aset Irigasi menceritakan tentang Bagian ini menggambarkan kondisi aset fisik jaringan irigasi dan prasarana pendukungnya di B/BWS secara umum, yang meliputi : jumlah Daerah Irigasi (DI), luas lahan, laju alih fungsi, kondisi dan fungsi jaringan irigasi maupun prasarana pendukungnya
 - c. Kondisi Kinerja Sistem Irigasi menceritakan tentang Kondisi Kinerja sistem irigasi di B/BWS/Provinsi/Kabupaten dalam bentuk tabel kondisi hasil evaluasi Kinerja DI.

6. Pendapatan Petani: analisa diuraikan perkembangan sektor pertanian kabupaten dengan satuan analisa kecamatan, karena data tersedia menurut desa/kecamatan. Seperti
 - a. Penguasaan dan Kepemilikan Lahan Irigasi, Pola Tanam dalam 5 Tahun Terakhir, Produksi dan Produktivitas Tanaman dalam 5 Tahun Terakhir.
 - b. Pola Tanam dalam 5 Tahun Terakhir
 - c. Produksi dan Produktivitas Tanaman dalam 5 Tahun Terakhir; Total produksi padi (Ton GKG) dari tiap kecamatan, selama 5 tahun terakhir, disajikan dalam FORMAT
 - d. Pengelohan dan Pemasaran Hasil Pertanian: menjelaskan tentang Uraian perkembangan pengolahan dan pemasaran hasil lahan pertanian beririgasi selama lima tahun terakhir. Bila terjadi perubahan supaya diuraikan penyebab terjadinya perubahan tersebut, Diuraikan juga perkembangan peralatan pengolahan hasil pertanian, termasuk adanya bantuan peralatan dari pemerintah selama 5 tahun terakhir. Kalau ada program bantuan peralatan pengolahan hasil yang diberikan oleh pemerintah supaya disebutkan sumber pendanaannya, dan bagaimana pengelolaannya di tingkat petani serta dampak dari pemberian peralatan ini.
 - e. Pendapatan dan Pola Pendapatan Petani Sawah Irigasi; Data mengenai pendapatan dan pola pendapatan petani di lahan sawah beririgasi disajikan dalam FORMAT

Bila data tersedia, pendapatan (Rp juta/ha) diuraikan untuk tiap jenis tanaman (padi, jagung, kacang tanah, kedelai, sayuran dan buah-buahan) menurut musim tanam (MTI, MTII, MTIII) selama 5 tahun terakhir

Data sekunder untuk keperluan ini didapatkan dari Data “Kabupaten Dalam Angka”, data Statistik Pada Dinas Pertanian, Data Statistik yang dikumpulkan oleh BPS Kabupaten, seperti data Sensus Pertanian, Sensus Penduduk, SUSENAS, data Survey Pertanian kerja sama BPS dan Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, dan informasi dari PSETK.

Tabel 5. Penjelasan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi

II	Dokumen RP21
3	Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
3.1	Bidang PUPR
3..1.1	Rencana Pengembangan Irigasi
3.1.2	Rencana Pengelolaan irigasi

Adapun penjelasan tabel 5 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pengembangan dan Pengelolaaan Irigasi Bidang PUPR
Menjelaskan tentang gambaran umum pemanfaatan air Wilayah sungai, dengan kebijakan RTRW, penggunaan air sungai. Ceritakan tentang potensi Pengembangan Irigasi di Kabupaten beserta permasalahannya, program B/BWS dalam dalam rangka pengembangan irigasi
2. Rencana Pembangunan Jaringan Irigasi Baru menjelaskan tentang Sasaran program pembangunan jaringan irigasi, Pembangunan jaringan irigasi pada daerah-daerah irigasi yang baru,
 - a. Sosialisasi & Konsultasi Publik dijelaskan rencana dan tujuan kegiatan tersebut dan disajikan dalam format tabel format tabel PU-01
 - b. Survei, Investigasi dan Disain (SID); dijelaskan tentang urutan kegiatan SID pada pembangunan baru seperti dimulai dari Feasibility Study, Pelaksanaan survei partisipatif, Pelaksanaan screening safeguards, Disain partisipatif jaringan irigasi, Sosialisasi hasil disain partisipatif, Finalisasi disain partisipatif disajikan dalam format tabel PU-02.
 - c. Pengadaan Tanah: dijelaskan tentang tujuan pengadaan, alokasi anggaran serta peran serta masyarakat pada pembangunan jaringan baru selama 5 tahun ke depan dan ditampilkan dalam tabel format format tabel PU-03
 - d. Pelaksanaan Konstruksi: diberikan penjelasan tentang rencana pelaksanaan konstruksi selama 5 tahun ke depan pada pembangunan dan pengembangan DI dimulai dari penyiapan dokumen lingkungan, sampai pelaksanaan PHO dan ditampilkan pada format tabel PU-04

- e. Persiapan O&P (Promp) ; dijelaskan rencana kegiatan dimulai dari pembentukan tim audit kesiapan O&P, Uji pengaliran, membuat atau menyesuaikan manual O&P serta rekomendasinya serta ditampilkan dalam tabel format PU-05
- f. Modernisasi Irigasi: menjelaskan tentang 5 pilar Irigasi, rencana pembiayaan Modernisasi Irigasi dan dijelaskan pada format tabel PU-06

3. Rencana Pengelolaan Irigasi

- a. Menjelaskan tentang Rencana Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan pembiayaan selama 5 tahun ke depan dan disajikan dalam format tabel PU-07 dan PU-08.
- b. Rehabilitasi : Dalam rencana rehabilitasi 5 tahun ke depan dijelaskan tentang prosesv Sosialisasi & Konsultansi Publik, SID Pengadaan tanah, sampai pada kegiatan persiapan O&P dan ditampilkan dalam format PU-09.

Tabel 6. Penjelasan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Bidang Bappeda

II	Dokumen RP21
3	Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
3.2	Bidang Bappeda
3..2.1	Pemberdayaan KPI
3.2.2	Pemberdayaan TPM
3.2.3	Pelatihan dan Penyusunan PSETK

Adapun penjelasan tabel 6 adalah sebagai berikut:

- Rencana Pengembangan dan Pengelolaaan Irigasi Bidang BAPPEDA
- a. Pemberdayaan KPI seperti menyiapkan Kerangka Hukum untuk PPSI, Penguatan KPI Gambaran yang lebih rinci mengenai rencana pelatihan SDM di instansi-instansi pemerintah, jenis pelatihan yang dilakukan

- b. Pemberdayaan TPM : menjelaskan tentang Program pengadaan TPM/KTPM dalam 5 tahun mendatang; Tugas Pendampingan (aspek Kelembagaan, Teknik, Ekonomi) oleh TPM dan KPL; Fasilitasi penyusunan program kerja P3A/GP3A/IP3A; Peningkatan kapasitas TPM/KTPM dan KPL antara lain melalui pelatihan dll. Dan Kebutuhan TPM/KTPM tergantung pada jumlah DI dan luas total DI yang masuk program.
- c. Pelatihan dan Penyusunan PSETK ; menjelaskan tentang Pelatihan diperlukan selama paling tidak 4 tahun pertama RP2I, supaya staf Dinas PU/SDA dan TPM memahami cara pelaksanaan PSETK. Untuk rencana Program pelatihan PSETK dapat disajikan dalam Format

Tabel 7. Penjelasan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Bidang Pertanian

II	Dokumen RP21
3	Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
3.3	Bidang Pertanian
3..3.1	Pemberdayaan KPI
3.3.2	Peningkatan Pendapatan Usaha Tani
3.3.3	Jaminan Keberlanjutan Pertanian

Adapun penjelasan tabel 7 adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Pengembangan dan Pengelolaaan Irigasi Bidang Pertanian Pemberdayaan KPI seperti:
 1. Pengembangan Pertanian menjelaskan Ringkasan kegiatan untuk pengadaan, pelatihan serta gaji PPL terdapat dalam FORMAT Rekap Pertanian.
 2. Pelatihan peningkatan kapasitas PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) seperti rencana pelatihan PPL selama 5 tahun ke depan dan disajikan dalam rincian format tabel.
 3. Pengadaan peralatan kerja PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan): dijelaskan perlunya pengadaan peralatan untuk PPL serta peralatan yang diperlukan seperti alat bantu speaker/microphone, Penyediaan foto, film dan ilustrasi penunjang proses serta ditampilkan dalam tabel format

4. Pemberdayaan Poktan/Gapoktan: menjelaskan tentang rencana peningkatan kapasitas Poktan/Gapoktan selama 5 tahun ke depan dapat dilihat sebagai berikut dalam Format tabel (Rekap Pertanian)
- b. Peningkatan Pendapatan Usaha Tani seperti Fasilitasi dan program pembiayaan Akses Informasi dan Kredit Pertanian, Bantuan Teknis Sistem Stimulan (Benih, Puput, dan lain-lain)
- c. Jaminan keberlanjutan Pertanian
- Besarnya alih fungsi lahan irigasi yang telah terjadi di Kabupaten selama 5 tahun terakhir , penyebabnya serta upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah serta upaya pencegannya sepeti menjelaskan Perda-perda yang sudah dihasilkan dalam pencegahan alih fungsi lahan sebagai turunan UU no.41 tahun 2009 tentang LP2B serta RTRW wilayah kabupaten

Tabel 8. Penjelasan Pelaksanaan DI berbasis Skala Prioritas

II	Dokumen RP21
4	Penjadwalan Penanganan DI sesuai Skala Proritas
4.1	Data DI sesuai kewenangan
4.2	Jadwal Pelaksanaan DI berbasis Skala Prioritas

Adapun penjelasan tabel 8 adalah sebagai berikut:

1. Data DI sesuai kewenangan

Dijelasskan informasi Daerah Irigasi yang ada di kabupaten kabupaten, sesuai Permen PUPR No 14/ /2015 juga terdapat DI yang dikelola oleh kabupaten, Provinsi dan Pusat:

Dijelaskan dalam Tabel Ringkasan Wewenang Daerah Irigasi

No.	Wewenang Tingkat	Luas Daerah Irigasi (ha)	Jumlah DI	Luas Fungsional (ha)
1.	Kabupaten			
1.1	Utuh dalam Kabupaten	< 1.000 ha		
		Total kabupaten		

No.	Wewenang Tingkat	Luas Daerah Irigasi (ha)	Jumlah DI	Luas Fungsional (ha)
2	Provinsi			
2.1	Lintas batas Kabupaten	< 1.000 ha		
2.2	Lintas batas Kabupaten	1.000 - 3.000 ha		
2.3	Utuh dalam Kabupaten	1.000 -3.000 ha		
		Total Provinsi		
3.	Pusat			
3.1	Lintas batas Provinsi	<1.000 ha		
3.2	Lintas batas Provinsi	1.000 - 3.000 ha		
3.3	Lintas batas Provinsi	>3.000 ha		
3.4	Lintas batas Kabupaten	>3.000 ha		
3.5	Utuh dalam Kabupaten	>3.000 ha		
3.6	Utuh dalam Kabupaten	1.0003.000 ha		
3.7	Utuh dalam Kabupaten	< 1.000 ha		
		Total Pusat		
	TOTAL			

Sumber data : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2. Jadwal Pelaksanaan DI berbasis Skala Prioritas

Dalam menyusun *DI berbasis Skala Prioritas* jaringan irigasi untuk periode 5 tahun kedepan, yang merupakan masa perencanaan untuk RP2I, harus dijelaskan DI-DI yang dipilih sebagai DI prioritas.

Prioritas bisa ditentukan dengan kriteria sbb:

Prioritas 1: DI-DI yang telah disiapkan desain (SID) untuk rehabilitasi, namun konstruksi belum dilaksanakan.

Prioritas 2: DI-DI yang perlu rehabilitasi, dilihat dari kondisi aset fisik irigasi yang ada sekarang.

DI-DI yang telah direhabilitasi (perbaikan fisik) dalam 5 tahun terakhir tentunya tidak dipilih lagi sebagai DI prioritas untuk 5 tahun kedepan.

Dari Sistem Informasi RP2I terdapat daftar DI yang ada di b/BWS yang belum direhabilitasi jaringan irigasi utamanya selama 5 tahun terakhir, dibuat dalam FORMAT TABEL Daftar DI tersebut merupakan calon DI prioritas untuk diseleksi dalam periode 5 tahun kedepan.

Tabel 9. Penjelasan Penutup

II	Dokumen RP21
5	Penutup
4.1	Kesimpulan
4.2	Saran

Adapun penjelasan tabel 9 adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan

Dijelaskan tentang hasil rangkuman rencana Pembiayaan B/BWS dalam Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Kesimpulan Starategi Pembiayaan, kendala-kendalanya

2. Saran

Menjelaskan tentanag saran tentang pelaksanaan RP2I, pemecahannya, koordinasi penyusunannya serta aspek pembiayaannya.